

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia modern dewasa ini memungkinkan perkembangan segala macam aktivitas di setiap negara mulai berangsur berjalan dinamis seiring perkembangan ekonomi dunia. Pada kondisi inilah setiap negara di dunia memungkinkan dengan berbagai caranya masing-masing melakukan adaptasi agar dapat mengikuti pasar global yang semakin marak dengan berbagai persaingan yang ada. Setiap negara memiliki berbagai potensi yang dapat didayagunakan dalam mendukung pendapatan daerahnya, maka dibutuhkanlah berbagai cara dalam melindungi berbagai potensi tersebut oleh masing-masing negara.

Untuk Indonesia sendiri memiliki upaya perlindungan dalam melindungi potensi yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan pendapatan negaranya. Hal ini dilakukan melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu sebuah hak manual eksklusif yang terdiri dari dua macam yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang *inventor* dan pendesain untuk mendapatkan keuntungan atas invensi dan karya desain industrinya. Sedangkan yang dimaksud hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi *inventor* (penemu) dan reputasi pendesain. Sulistyو menerangkan bahwa hak moral juga mencakup hak untuk menyatakan keberatan terhadap tindakan perusakan, pemotongan, atau perubahan karya paten dan desain industri yang bersifat merugikan nama baik atau reputasi *inventor*.¹

Merujuk pada uraian di atas maka Hak kekayaan Intelektual (HaKI) dapat diartikan sebagai hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul akibat kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa

¹Sudarmanto, 2012, "*KI & HKI serta Implementasinya bagi Indonesia*", Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hal.2.

karya di bidang teknologi ilmu pengetahuan seni, dan sastra. Akan tetapi, selain mencakup hak yang berkenaan dengan kekayaan, HaKI juga mencakup perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan seseorang.

Pada lain hal, semakin derasnya arus perdagangan bebas menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu negara, hal ini menjadi bukti bahwa kondisi tersebut memicu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan setiap negara yang bersangkutan. Seiring dengan hal tersebut, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya untuk semakin disadari. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Hak Kekayaan Intelektual dapat difungsikan sebagai alat penunjang pembangunan ekonomi sebagai bentuk aset tak nyata. Sedangkan di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual di dunia usaha belum terlalu diperhatikan secara menyeluruh keberadaan serta proses perlindungannya.²

Produk-produk Hak Kekayaan Intelektual pada hakekatnya harus mendapatkan perlindungan hukum agar memperoleh jaminan dalam upaya memproduksikannya, pemberian tanda pembeda atau merek, perdagangan dan pemasaran, serta tahap pembelian dan pemenuhan kebutuhan konsumen atau masyarakat. Upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak kekayaan intelektual dapat dilihat dari sisi empat kepentingan yaitu individu pencipta dan penemu, individu dan perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masyarakat dan peradaban.³ Salah satu wilayah di Indonesia dengan segala produk-produk yang dapat diberikan perlindungan hukum atasnya ialah Kabupaten Karanganyar.

Berbagai produk atau potensi yang ada di Kabupaten Karanganyar dipandang sebagai sebuah produk kebudayaan yang mencerminkan kearifan

²Buletin Informasi dan Keragaman HKI "*Media HKI*", Vol . III/No.3, Juni, 2006, hal. 20.

³Maringan Lumbanraja, 2000, "*Arti Penting HaKI dalam Perdagangan Bebas*", Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 2

lokal masyarakat setempat sehingga layak mendapatkan pengaturan hukum yang menjadi regulasi kebijakan daripadanya. Pemberian aturan hukum pada berbagai produk dan industri yang ada di Karanganyar didasarkan pada alasan agar dapat mencegah penyalahgunaan dalam bentuk *misappropriation* dan *misuse*, dapat melindungi hak asasi manusia dalam penciptaan karya, dapat menghasilkan pembagian manfaat yang adil, sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan ekonomi komunitas, dan dapat memajukan kepentingan nasional.⁴

Berbagai produk yang tergolong dapat diberikan perlindungan HaKI yaitu adalah paten. Peraturan tentang paten tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109) tersebut, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Salah satu peraturan pemerintah dalam bidang paten adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 Tanggal 29 Agustus 1995 tentang Komisi Banding Paten. Berdasarkan uraian tersebut, paten dapat diartikulasikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor*, atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu, untuk melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Lebih lanjut, terdapat pula Peraturan Tentang Merek yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110) yang menerangkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

⁴Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT Alumni, hal. 446.

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya terdapat pula Peraturan Pemerintah tentang Merek yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 Tanggal 29 Agustus 1995 tentang Komisi Banding Merek, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tanggal 31 Maret 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tanggal 31 Maret 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

Berdasar pendaftaranlah maka tercipta hak atas merek, sehingga hak ini dapat dikatakan hak yang eksklusif, artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama dan untuk jenis barang yang serupa.⁵ Selanjutnya, terdapat pula peraturan tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002. Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan pemerintah di bidang Hak Cipta yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tanggal 5 April 1989 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tanggal 14 Januari 1989 tentang Penterjemahan dan atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya terdapat pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 Tanggal 6 Maret 1986 tentang Dewan Hak Cipta. Auterswet menerangkan bahwa Hak Cipta adalah hak tunggal dari pada pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁶

⁵Sudargo Gautama, 1993, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 5.

⁶Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 29.

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.⁷ Hal tersebut kemudian dikuatkan dengan Peraturan Desain Industri Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 243). Pasal 1 ayat 1 berisi Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Aspek desain dapat mencakup desain produk seperti mesin-mesin pertanian, furnitur, garmen, kerajinan, maupun kemasan dari suatu produk. Misalnya saja, sebuah produk makanan yang sederhana bisa terlihat mewah dan mahal bila didukung oleh desain kemasan yang menarik.⁸

Lebih lanjut, di samping Undang-Undang HaKI, saat ini Indonesia telah meratifikasi (mengesahkan) berbagai konvensi Internasional yang berkaitan dengan HaKI, yaitu: *Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs)-WTO, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979), *Patent Cooperation Treaty* (PCT) and *Regulation Under The PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997), *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997), *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997), *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997), *Convention on Biological Diversity* (CBD) (UU No. 5, 1994), Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 (Pasal 13 ayat 3), Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005.

⁷Tim Lindsey, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni, hal. 96.

⁸*Ibid.* hal. 75.

Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu Nomor 7 Tahun 2006 mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 yaitu tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Nomor 15 Tahun 2006 tentang Izin Pengusahaan, Pengambilan Dan Pengelolaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*COLLOCALIA*) di Habitat Alami (*IN-SITU*) dan Habitat Buatan (*EX-SITU*), Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pertanian Sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan Perikanan, Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan dan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, di mana peraturan-peraturan daerah tersebut merupakan peraturan yang mempunyai tujuan melindungi kekayaan daerah yang dimiliki Kabupaten Karanganyar sehingga dapat mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

Terdapat berbagai contoh produk di Kabupaten Karanganyar yang layak mendapatkan perlindungan HaKI untuk pengelolaan dan menjaga eksistensinya di antaranya yaitu pada desain industri terdapat industri anyaman bambu di Kecamatan Karanganyar, industri Batik Girilayu di Desa Girilayu Kecamatan Matesih, Industri Ketela Ungu di Desa Karanglo Tawangmangu, Industri Strowberi di Desa Kalisoro Tawangmangu, dan juga Industri Wortel di Desa Plumbon Tawangmangu. Di samping itu, pada produk paten sendiri di Kabupaten Karanganyar terdapat mesin penggilingan tebu Pabrik Gula Tasikmadu yang memungkinkan dapat dipatenkan. Sementara pada produk cipta sendiri Kabupaten Karanganyar memiliki beberapa lagu serta seni, sastra, ilmu pengetahuan, serta hak-hak terkait (pelaku, rekaman, penyiaran). Berbagai potensi tersebut dewasa ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka menjadi menarik adanya kajian terkait berbagai hal tersebut sebagai bentuk deskripsi terhadap kondisi yang menyertainya dalam kacamata Ilmu Hukum.

B. Rumusan Masalah

Terdapat rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Bagaimana Kebijakan Perlindungan HaKI di Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar terkait perlindungan HaKI yang ada di wilayahnya?
3. Model kebijakan apa yang dapat dikembangkan sebagai solusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam kebijakan perlindungan HaKI di wilayahnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan perlindungan HaKI yang ada di Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar terkait perlindungan HaKI yang ada di wilayahnya.
3. Untuk menggambarkan model kebijakan apa yang dapat dikembangkan sebagai solusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam kebijakan perlindungan HaKI di wilayahnya.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat berbagai manfaat yang ada dalam penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan HaKI sebagai salah satu kajian teoritis dalam ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar terkait perlindungan HaKI yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan informasi dan membuka wawasan bagi masyarakat pada umumnya serta masyarakat di Kabupaten Karanganyar pada khususnya, terkait perlindungan HaKI yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

E. Kerangka Pemikiran

Kabupaten Karanganyar merupakan suatu daerah yang memiliki banyak potensi lokal yang diwujudkan dalam produk-produk unggulan yaitu seperti batik, karya cipta lagu, seni ukir dan lain-lain, melihat sekarang ini produk-produk itu banyak yang belum didaftarkan atau memperoleh suatu perlindungan dari Pemerintah Karanganyar. Di dalam aturan HaKI, termuat Hak Cipta, Paten, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Terkait hal tersebut, secara langsung Pemerintah Karanganyar sendiri mempunyai suatu kebijakan dan upaya-upaya untuk melindungi produk-produk/potensi lokalnya agar dapat memiliki suatu kekuatan hukum dan tidak terjadi suatu penjiplakan terhadap berbagai hal tersebut.

Perindustrian memegang peran yang sangat penting bagi peningkatan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Industri terbanyak dalam masyarakat adalah industri kecil yang dilaksanakan oleh rumah tangga dengan produksi dan pendapatan relatif lebih rendah. Industri menengah dan Besar relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan industri kecil baik yang bersifat formal maupun non formal. Peningkatan jenis ekspor dari Industri menengah dan besar ataupun Industri kecil ini sudah sangat jelas dapat membantu Pemerintah setempat dalam menangani permasalahan tenaga kerja. Tentunya

jumlah investasi yang ada di Kabupaten Karanganyar juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam angka, jenis Industri Karanganyar Tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

No	Data	2013	2014
1	Kulit/ Penyamakan	1	1
2	Kayu	110	113
3	Logam/ Logam Mulia	8	17
4	Anyaman Bambu/ Kerajinan	103	108
5	Gerabah	0	0
6	Kain Tenun/ Pertenunan	20	20
7	Makanan	181	187
8	Lainnya	771	805

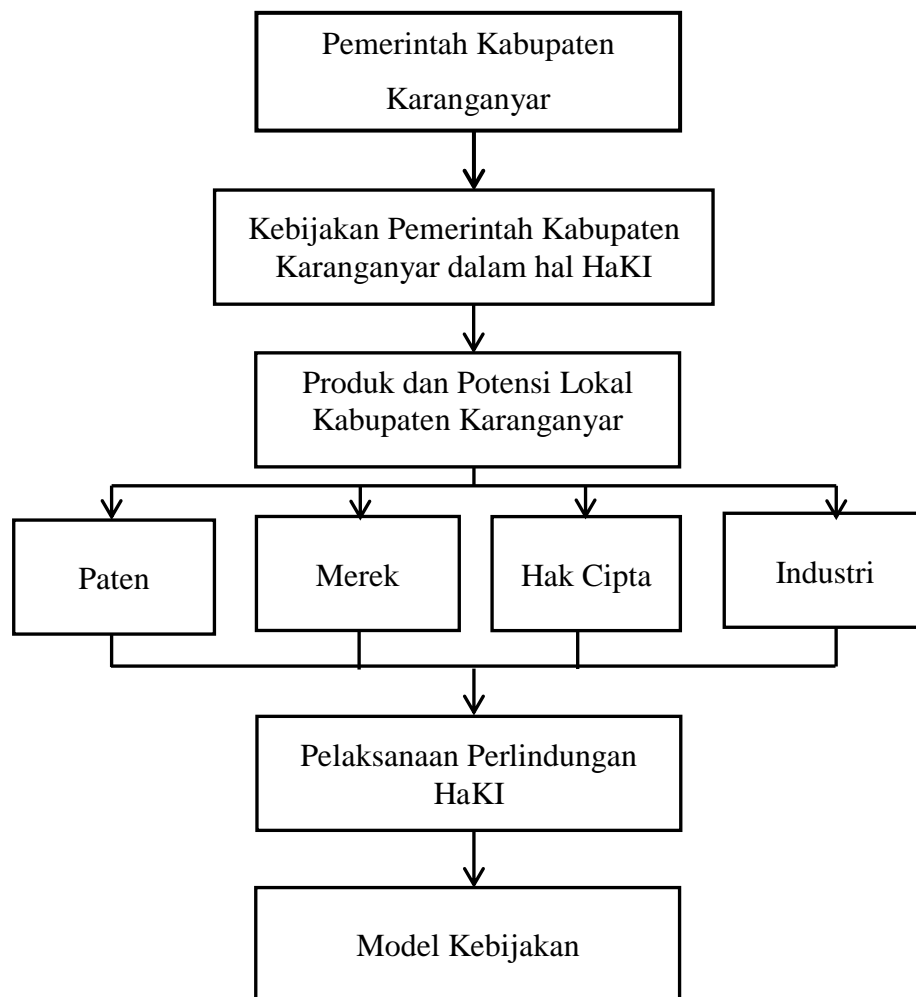
(Sumber: Disperindagkop-kab.karanganyar.com)

Lebih lanjut, Kabupaten Karanganyar sendiri memiliki berbagai klasifikasi produk yang memungkinkan dapat dilakukan upaya perlindungan HaKI terhadapnya, diantaranya yaitu paten. Paten yang dimaksud di sini adalah suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya, contohnya yaitu mesin penggilingan tebu yang kemudian diproses lagi untuk menjadi gula di Pabrik Gula Tasikmadu. Kemudian ada juga Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusasteraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung, karya arsitektur, film, dan lain-lain.⁹ Di samping itu ada juga Merek, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam

⁹Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT Alumni, hal. 27.

kegiatan perdagangan barang atau jasa. Contoh yang ada di wilayah Karanganyar adalah PT. Air Mancur di Kawasan Industri Palur dengan produk-produk jamu yang dihasilkan. Desain Industri, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan, contohnya desain cap batik.

Studi di atas selanjutnya dikaji melalui pendekatan normatif, maksudnya penelitian hukum ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya terkait perlindungan HaKI yang ada di Kabupaten Karanganyar. Pada pelaksanaan perlindungan tersebut tentunya terdapat fenomena yang teridentifikasi sebagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan HaKI yang ada di kabupaten Karanganyar, identifikasi ini penting sebagai telaah model yang dimungkinkan dapat dikembangkan untuk kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar agar dapat melindungi berbagai produk dan potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat memajukan daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk lebih memudahkan gambaran mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini maka dapat disederhanakan ke dalam Bagan 1 sebagai berikut:



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar terkait perlindungan di bidang HaKI yang dibahas dalam kajian ini. Beberapa hal yang berhubungan dengan metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Maksud pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang mengkaji pada peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum

yang koheren. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya.¹⁰ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah daerah. Kemudian dikaitkan dengan pendapat-pendapat dan hasil penelitian para sarjana serta data berupa bahan dari kamus hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian hukum adalah penulisan yang bersifat empiris atau sosiologis. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan. Dengan meneliti langsung kita akan mendapatkan data yang nyata dan faktual. Penelitian hukum sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹¹

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama dari sumber asal yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.¹² Dalam hal ini data berwujud hasil wawancara dari para informan serta beberapa data numerik terkait permasalahan mengenai kebijakan perlindungan HaKI oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 23-24.

¹¹Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53.

¹²Hilman Hadikusuma, 2005, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 65.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Peraturan Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis hendak menggunakan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa sebagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*unterviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³ Wawancara dilakukan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dan Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar selaku pemerintah daerah yang mempunyai wewenang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

c. Studi Kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di lingkungan Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dan Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar selaku pemerintah daerah yang mempunyai wewenang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual di wilayah Karanganyar serta wilayah-wilayah di daerah Karanganyar yang mempunyai suatu produk-produk unggulan yang menyangkut bidang Hak atas Kekayaan Intelektual. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan pada umumnya instansi pemerintah saat ini telah melakukan suatu upaya atau tindakan yang sesuai dengan fungsi dan tujuan dari instansi tersebut dalam hal ini melakukan suatu kebijakan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan

¹³Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 86.

perlindungan HaKI di Kabupaten Karanganyar, kemudian bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar terkait perlindungan HaKI yang ada di wilayahnya, serta model kebijakan apa yang dapat dikembangkan sebagai solusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam menerapkan kebijakan perlindungan HaKI di wilayahnya.

5. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dan valid dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan logis sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perlakuannya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan.¹⁴

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dalam Bab ini akan dituliskan beberapa hal yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan umum tentang kebijakan, pengupayaan atau tindakan Pemerintah Daerah Karanganyar terkait Perlindungan HaKI serta model sebagai solusi bahan masukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam hal perlindungan HaKI.

¹⁴Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal. 5.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, dimana dalam bab ini akan dituliskan uraian dan bahasan tentang kebijakan perlindungan HaKI di Kabupaten Karanganyar, upaya serta tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar terkait perlindungan HaKI yang ada di wilayahnya, serta model kebijakan yang dapat dikembangkan sebagai solusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam kebijakan perlindungan HaKI di wilayahnya.

Bab IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.